



Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat luas, termasuk dalam praktik politik lokal yang masih hidup dan berkelindan dengan sistem demokrasi modern. Salah satu praktik politik lokal yang paling unik sekaligus kontroversial adalah sistem noken di Papua. Sistem ini menggunakan noken—tas anyaman tradisional khas masyarakat Papua—sebagai media pengganti kotak suara atau sebagai sarana perwakilan suara kolektif dalam pemilihan umum. Noken tidak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, dan filosofis yang mendalam, terutama terkait dengan prinsip kolektivitas, musyawarah, dan solidaritas sosial masyarakat adat Papua. Penetapan noken sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 semakin menegaskan bahwa noken merupakan simbol identitas dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks sosial-politik, sistem noken berakar pada budaya pengambilan keputusan kolektif yang dipimpin oleh kepala suku atau tokoh adat. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk adaptasi budaya lokal terhadap demokrasi modern, sekaligus sebagai upaya menjaga harmoni dan kesatuan komunitas dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat. Negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi juga mengakui sistem noken sebagai bagian dari kearifan lokal yang sah digunakan dalam pemilu di wilayah tertentu di Papua. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak menghapus berbagai kritik terhadap sistem noken, terutama terkait dengan prinsip demokrasi universal seperti “one man, one vote”, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak politik individu.

Sistem noken dinilai memiliki sifat ambivalen. Di satu sisi, ia dianggap mampu memperkuat kolektivitas masyarakat dan mencegah konflik internal akibat perbedaan pilihan politik. Di sisi lain, sistem ini membuka ruang dominasi elite adat, praktik manipulasi suara, serta potensi konflik horizontal antar kelompok dan suku. Dalam konteks Papua yang memiliki sejarah panjang konflik politik, marginalisasi, dan ketegangan relasi antara masyarakat adat dan negara, sistem noken kerap menjadi simbol pertarungan antara identitas budaya lokal dan demokrasi prosedural negara. Pergeseran makna noken dari simbol solidaritas menjadi instrumen politik elektoral yang sarat kepentingan pragmatis memperlihatkan adanya krisis nilai dan integrasi sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Papua terhadap sistem noken, kolektivitas masyarakat, dan konflik politik yang



menyertainya. Mahasiswa dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka merupakan generasi muda terdidik yang memiliki posisi strategis dalam merefleksikan relasi antara tradisi budaya, demokrasi, dan dinamika politik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif, yang menafsirkan pengalaman, pandangan, dan pemaknaan mahasiswa terhadap sistem noken dalam konteks sosial-politik Papua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Papua memandang sistem noken secara kritis dan ambivalen. Sebagian melihatnya sebagai simbol identitas budaya dan kolektivitas yang perlu dihormati, sementara sebagian lain menilai sistem ini perlu direformasi karena berpotensi membatasi kebebasan politik individu dan memicu konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa kolektivitas yang dibangun melalui sistem noken tidak selalu bersifat inklusif dan demokratis, melainkan dapat berubah menjadi alat kontrol kekuasaan ketika tidak disertai mekanisme pengawasan yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya dialog partisipatif dan reformasi sistem pemilu yang sensitif terhadap budaya lokal, agar nilai-nilai kolektivitas masyarakat Papua dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik warga negara.

#### Abstract

Indonesia is a country with vast cultural diversity, including in its local political practices, which are still alive and intertwined with the modern democratic system. One of the most unique and controversial local political practices is the noken system in Papua. This system uses noken—traditional woven bags typical of Papuan communities—as a substitute for ballot boxes or as a means of collective representation in general elections. Noken not only has functional value, but also carries deep social, cultural, and philosophical meanings, especially in relation to the principles of collectivity, deliberation, and social solidarity among indigenous Papuan communities. The designation of noken as a World Intangible Cultural Heritage by UNESCO in 2012 further emphasizes that noken is a symbol of identity and a system of values that has been passed down from generation to generation.

In a socio-political context, the noken system is rooted in a culture of collective decision-making led by tribal chiefs or traditional leaders. This mechanism is seen as a form of local cultural adaptation to modern democracy, as well as an effort to maintain harmony and unity



**KONFLIK SISTEM NOKEN DALAM MEMBENTUK KOLEKTIVITAS MASYARAKAT DI PAPUA**  
BOY KIWAK, Prof. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

within communities that have strong social ties. The state, through a Constitutional Court ruling, also recognizes the noken system as part of local wisdom that is legally used in elections in certain areas of Papua. However, this recognition does not eliminate various criticisms of the noken system, especially regarding